

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam, P. D. H. R. *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) yang telah direvisi*. Restu Agung. (2009).
- Agusmidah. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Ghalia Indonesia. (2010).
- Anggrayni, L. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Suska Press. (2014).
- Apeldoorn, L. J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum* (26th ed.). Pradnya Paramita. (1996).
- Apeldoorn, L. Van. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT Revika Aditama. (2006).
- Asikin, H. Z. *Pengantar Ilmu Hukum*. RajaGrafindo Persada. (2012).
- Djumialdji. *Perjanjian Kerja*. Sinar Grafika. (2005).
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. PT. Grasindo. (2007).
- Halili Toha, H. *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh* (CetakanPer). Bina Aksara. (1987).
- Harianto, A. *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*. LaksBang Pressindo. (2016).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. (2002).
- Husni, L. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. RajaGrafindo Persada. (2010).

- Khakim, A. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Citra Aditya Bakti. (2003).
- Kusumaatmadja, M. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bina Cipta. (2-3).
- Manulang, S. H. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (cet-1)*. Rineke Cipta. (1990).
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. (2014).
- Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Liberty. (1999).
- Muladi. *Hak Asasi Manusia-Hakekat Konsep & Impilkasi Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat* (3rd ed.). Refika Aditama. (2009).
- RG.Widianingsih, C. K. S. *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*. Armico. (1982).
- Rusli, H. *Hukum Ketenagakerjaan 2003*. Ghalia Indonesia. (2004).
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Cetakan Ke)*. Citra Aditya Bakti. (2001).
- Sidharta, M. K. B. A. *Pengantar Ilmu Hukum (Buku I)*. P.T. ALUMNI. (2016).
- Soemitro, R. H. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. PT Ghalia Indonesia. (1990).
- Soepomo, I. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja (Cetakan ke)*. Djambatan. (1994).
- Triyanto, D. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Kontruksi*. Mandar Maju. (2004).

Yadiman. *Metode Penelitian Hukum*. Lekkas. (2019).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Perlindungan.

C. SUMBER LAIN

Amin, M. Pengawasan Ketenagakerjaan Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Perusahaan-Perusahaan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Records Management Journal*, 1(2), 1–15. (2003).

- Devie. *Prosedur Rekrutmen, Perancangan Formulir dan Perjanjian Kerja Harian Lepas di PT Usaha Dagang Niaga*. 1–64. (2019).
- Farida, A., & Nasichin. Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia: Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transedental. *Seminar Nasional Hukum Transedental: Pengembangan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, 227–240. (2018).
<http://hdl.handle.net/11617/9699>
- Hanifah, I. Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perdata Pekerja Rumah Tangga Dalam Penegakan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional. *Universitas Sumatera Utara*. (2018).
- Hernawan, A. Kompleksitas Permasalahan Dalam Pembuatan Peraturan Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2(1), 4. (2013).
- Latupono, B. Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon. *Sasi*, 17(3), 59. (2011).
<https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366>
- Maulida, N. Hak Keperdataan Bagi Pekerja Untuk Diikutsertakan Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. In *Jurnal Kesehatan Poltekkes Ternate* (Vol. 13, Issue 2). Repository Universitas Jember. (2020).
- Pohan, M. R. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Menurut Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Merdeka*, 1(2), 60–71. (2020). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj>

- Ridwansyah, M. Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 278. (2016).
<https://doi.org/10.31078/jk1323>
- Sarwohadi. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Demokrasi*. 23. (2012).
- Soewono, D. H. Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Hukum.Unik.Kediri.Ac.Id*, 3(2), 402–413. (2019).
- Suharyanti, A. N. M. A. D. P. N. P. N. Perlindungan Hukum Hak Karyawan Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Perusahaan Yang Melarang Karyawannya Melamar Pekerjaan Di Tempat Lain. *Jurnal Legal Reasoning*, 2(2), 108–119. (2020).
- Utami, A. P. *Anggota Militer Yang Melanggar Ketentuan Di Luar KUHPM Dihubungkan Dengan Undang – Undang Peradilan Militer-*.(2021).
- Zulkarnaen, A.H. Penyuluhan Tentang Tata Cara Membuat Peraturan Perusahaan di PT. Pelangi Warna Kreasi Bandung. *Journal of Empowerment*.1(1).37. (2017).